

HAMBATAN DAN STRATEGI PENINGKATAN EKSPOR PRODUK PERIKANAN INDONESIA

(OBSTACLE AND STRATEGY TO IMPROVE INDONESIA'S EXPORTS OF FISHERIES PRODUCT)

Lukman Adam

(Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Nusantara II, Lantai 2, DPRRI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia;
email: mada.kenn@gmail.com)

Naskah Diterima: 26 Januari 2018, direvisi: 13 Maret 2018,
disetujui: 30 Maret 2018

Abstract

Currently, fisheries management is entering a new phase. At the beginning of the President Joko Widodo period, fisheries management mostly regulates the use of fishery resources and law enforcement against violations in the NKRI territory. Meanwhile, nowadays the Ministry of Marine Affairs and Fisheries focuses to increase the export of fisheries products. The focus of his study is to determine a fisheries export barriers and strategies to improve Indonesia export fisheries. Secondary Data from Ministry of Fisheries and Marine Affairs, Indonesia Statistic Agency, and FAO is mainly used in this study and it will be analyzed by exercising a descriptive analysis. The identified barriers are the presence of the fishing fleet which has not been optimized and processing activities of fishery product which did not fulfill the standards. Strategy important to be done are to improve the mechanisms of permits, develop the national fish logistics systems, promote quality of fisheries products, and develop Indonesia Fisheries Management Area. In addition to this, the principle of sustainable fisheries management must be a framework to improve Indonesia exports of fisheries.

Keywords: fisheries export barriers, export strategy, processing of fisheries product, the National Fish Logistics Systems, fisheries management areas, sustainable fisheries management.

Abstrak

Saat ini pengelolaan perikanan sedang memasuki babak baru. Di awal periode Presiden Joko Widodo, pengelolaan perikanan lebih banyak mengatur tata cara pemanfaatan sumber daya perikanan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di wilayah NKRI Saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan fokus pada upaya meningkatkan ekspor hasil perikanan. Permasalahan yang diangkat dalam kajian ini adalah mengidentifikasi hambatan utama ekspor dan bagaimana strategi meningkatkan ekspor perikanan Indonesia. Data sekunder yang digunakan terutama bersumber dari KKP, BPS, dan FAO, dengan metode analisis deskriptif. Studi ini menemukan, hambatan dalam peningkatan ekspor hasil perikanan di Indonesia adalah keberadaan armada perikanan Indonesia masih belum optimal dan masih adanya kegiatan pengolahan hasil perikanan yang belum memenuhi standar. Untuk mengatasi hambatan tersebut, strategi yang perlu dilakukan adalah perbaikan mekanisme pemberian izin, pembangunan Sistem Logistik Ikan Nasional, promosi kualitas produk perikanan Indonesia, dan pengembangan produk berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan. Sebagai tambahan, prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan harus menjadi kerangka dalam penentuan strategi peningkatan ekspor.

Kata kunci: ekspor perikanan, strategi ekspor, pengolahan hasil perikanan, Sistem Logistik Ikan Nasional, wilayah pengelolaan perikanan, perikanan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Awal tahun 2018, Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan yang substansinya sesuai dengan Wakil Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman bahwa sudah saatnya Indonesia mengejar peningkatan ekspor perikanan, selain mendukung upaya penegakan hukum terhadap pencurian ikan di wilayah Indonesia.¹ Pernyataan ini seolah menegaskan bahwa Indonesia sudah harus memerhatikan ekspor perikanan, mengingat besarnya potensi yang dimiliki.

Hal ini menjadi penting mengingat perairan Indonesia menjadi habitat 44,7 persen ikan, 40

persen moluska, dan 8,6 persen rumput laut.² Indonesia juga memiliki luas perairan mencapai 3,25 juta km², luas perairan kepulauan mencapai 2,95 juta km², laut teritorial seluas 0,30 juta km², dan ZEE mencapai 2,55 juta km².³ Potensi yang dimiliki tersebut ternyata tidak berbanding lurus dengan produksi perikanan Indonesia.

Faktanya produksi perikanan tangkap dan perikanan budi daya Indonesia masih berada di bawah negara yang tidak memiliki potensi sumber

¹ "Presiden: Perhatikan Ekspor Perikanan", (*online*), (<http://www.ksp.go.id/presiden-perhatikan-ekspor-perikanan/index.html>, diakses 18 Februari 2018).

² A. Mallowa, "Pengelolaan Sumberdaya Ikan Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat". Disampaikan dalam Lokakarya Agenda Penelitian Program COREMAP II, Kabupaten Selayar, 9 – 10 September 2006. Hal. 1.

³ Elviana Roza, 1 September 2017, "Maritim Indonesia, Kemewahan Yang Luar Biasa", (*online*), (<https://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa>, diakses 6 September 2017).

daya ikan dan keanekaragaman hayati sebesar Indonesia, seperti China. Produksi perikanan tangkap dan perikanan budi daya Indonesia berada di bawah China.⁴ Produksi perikanan tangkap China tahun 2014 mencapai 14,811 juta ton, sedangkan Indonesia mencapai 6,016 juta ton. Demikian juga dengan produksi perikanan budi daya tahun 2014, di mana Indonesia jauh tertinggal dengan China yang mampu menghasilkan total produksi mencapai 58,795 ribu ton, sedangkan Indonesia mencapai 14,330 ribu ton.⁵ Kemampuan China melampaui Indonesia, bisa jadi disebabkan armadanya yang modern dan teknologinya yang memadai sehingga kemampuan jelajahnya luas atau bisa disebabkan aktifitas *illegal fishing* yang mereka lakukan, mengingat adanya sejumlah informasi mengenai aktifitas tidak sah nelayan China di Samudera Atlantik.⁶

Data komoditas ekspor perikanan yang dikutip dari BPS tahun 2016 menunjukkan krustasea merupakan jenis hasil perikanan yang menjadi penyumbang terbesar ekspor hasil perikanan Indonesia. Dibandingkan tahun 2012, porsi nilai ekspor krustasea terhadap total ekspor hasil perikanan Indonesia mengalami peningkatan dari 43,83 persen menjadi 51,95 persen pada tahun 2016. Porsi nilai ekspor udang vanamei terhadap total ekspor kelompok krustasea sebesar 60,17 persen dan terhadap nilai total keseluruhan ekspor hasil perikanan sebesar 32,25 persen per tahun dalam periode 2012-2016. Sedangkan porsi nilai ekspor udang windu terhadap nilai total ekspor kelompok krustasea sebesar 20,05 persen dan terhadap total nilai total keseluruhan ekspor hasil perikanan sebesar 10,85 persen. Dengan demikian, udang vanamei dan udang windu merupakan komoditas unggulan yang sangat dominan menentukan kinerja ekspor hasil perikanan Indonesia.

Ekspor Indonesia sangat mengandalkan faktor-faktor keunggulan komparatif dalam penentu utama daya saingnya, terutama daya saing harga, seperti sumber daya alam berlimpah. Namun sayangnya

belum mengandalkan teknologi dan keahlian khusus yang merupakan faktor keunggulan kompetitif yang semakin dominan dalam penentuan daya saing. Selain itu, dengan tuntutan masyarakat dunia yang semakin kompleks menyangkut masalah lingkungan hidup, kelestarian alam beserta isinya, kesehatan, keamanan, dan hak asasi manusia membuat faktor-faktor keunggulan komparatif semakin tidak penting dibandingkan faktor-faktor keunggulan kompetitif.⁷ Atas dasar potensi dan fakta di atas, dalam kajian ini sejumlah pertanyaan yang muncul adalah apa hambatan ekspor perikanan Indonesia dan apa strategi meningkatkan ekspor perikanan Indonesia?

Dari aspek sistem, perdagangan sebagai pusat pembangunan ekonomi memiliki orientasi lebih ke luar dibandingkan orientasi ke dalam.⁸ Melalui perdagangan internasional, masing-masing negara dapat mencapai skala ekonominya. Khususnya apabila terjadi kelebihan produksi yang tidak bisa diserap konsumen dalam negeri.⁹ Kelebihan produksi tersebut bisa diekspor, di mana ekspor sangat penting bagi perekonomian melalui dua hal, yaitu sumber devisa utama dan motor pertumbuhan ekonomi.¹⁰

Salah satu komoditas unggulan Indonesia adalah komoditas perikanan, yang bisa diperoleh dari eksploitasi yang dilakukan melalui lingkungan terkontrol (dalam hal ini perikanan budi daya) dan lingkungan yang tidak dapat dikontrol (perikanan tangkap). Ketersediaan ikan pada tahun 2030 akan meningkat menjadi 186 juta ton dari 154 juta ton di tahun 2011. Peningkatan ini bersumber dari aktifitas perikanan budi daya. Proporsi perikanan tangkap dalam total kegiatan produksi perikanan dunia akan menurun dari 67,9 persen di tahun 2009 menjadi 58 persen di tahun 2030. Hal ini berimplikasi pada perkiraan bahwa pada tahun 2030 sebesar 62 persen ikan yang dikonsumsi bersumber dari perikanan budi daya, meningkat 18 persen dari konsumsi saat ini. Peningkatan proporsi perikanan budi daya ini akan membuat pemanfaatan produksi *seafood* menjadi berbeda. Model usaha perikanan budi daya secara signifikan berbeda dari industri perikanan tangkap, dalam hal modal, pemanfaatan lahan dan ekosistem, serta teknologi. Di samping itu juga memiliki risiko

⁴ Tidak termasuk Taiwan, karena Taiwan dikalkulasi terpisah dengan China. Provinsi China Taiwan berada dalam urutan ke-20 untuk perikanan tangkap dan ke-19 untuk perikanan budi daya.

⁵ FAO, "The State of World Fisheries and Aquaculture 2016", Rome: Food and Agriculture Organization of The United Nations, 2016.

⁶ Angkatan Laut Argentina pernah menembak dan menenggelamkan kapal ikan berbendera China di Selatan Atlantik tahun 2016, lihat "Argentinian forces shoot and sink Chinese boat illegally fishing in the South Atlantic after it attempted to ram coast guard vessel", (online), (<http://www.dailymail.co.uk/news/article-3493966/Argentine-coast-guard-sinks-Chinese-fishing-boat.html>), diakses 6 September 2018).

⁷ Syamsul Huda, "Analisis Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor Non-Migas Indonesia", *Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 6 (2), September 2006, pp. 117-124.

⁸ Stuart R. Lynn, *Economic Development*, USA: Pearson Education Inc, 2002.

⁹ Faisal Basri dan Haris Munandar, *Dasar-dasar Ekonomi Internasional*, Jakarta: Penerbit Prenada Media Group, 2010.

¹⁰ Indonesian Chamber of Commerce, 8 Juni 2012, "Ekspor dan Daya Saing", (online), (<http://image.kadin-indonesia.or.id/images/file/kadinindonesia20120608101837.pdf>), diakses 6 September 2017).

terhadap serangan hama dan penyakit yang bisa tiba-tiba terjadi. Oleh karena itu, maka diperlukan perencanaan yang matang.¹¹

Dari aspek perencanaan, perencanaan perikanan yang hanya mendasarkan pada faktor ekonomi juga tidak akan optimal karena ada faktor eko-biologi yang tidak terduga. Karena sifatnya yang kompleks, pengambilan kebijakan publik perikanan sebaiknya menggunakan kerangka pemikiran sistem dan tidak boleh parsial. Kedua, salah satu ciri khas utama perikanan dan sekaligus menjadi tantangannya adalah ketidakpastian (*fisheries uncertainty*) yang bersumber pada ketidakpastian alamiah (*natural uncertainties*) dan ketidakpastian manusia (*human uncertainties*).¹² Dari kerangka berpikir tersebut, perencanaan perikanan dalam hal ini perencanaan untuk mengatasi hambatan ekspor perikanan harus dilihat secara holistik, mulai dari kegiatan pra-panen, panen sampai pasca panen.

Fakta bahwa Amerika Serikat (AS), Jepang dan UE adalah negara utama yang menjadi tujuan ekspor produk perikanan Indonesia telah membuat langkah-langkah keamanan pangan yang konsisten dan dapat memengaruhi kinerja ekspor perikanan Indonesia. Melakukan harmonisasi terhadap standar yang lebih baik dapat membantu Indonesia untuk memenuhi persyaratan keamanan pangan dari negara maju. Selain itu, mengadopsi langkah-langkah keamanan pangan yang setara dengan standar negara pengimpor dapat mendorong Indonesia meningkatkan praktik keamanan pangan. Praktek keamanan pangan yang baik di sektor perikanan diharapkan dapat mengantisipasi permintaan konsumen internasional dan mengatasi hambatan perdagangan. Sebenarnya, peraturan berkaitan dengan keamanan pangan dalam produk perikanan telah ditetapkan sejak tahun 2002. Peraturan ini dibuat dengan mempertimbangkan standar keamanan pangan yang diterapkan secara internasional. Dengan demikian, efektivitas regulasi saat ini sangat tergantung pada konsistensi dalam pelaksanaannya.¹³ Aspek keamanan pangan merupakan syarat penting dalam ekspor perikanan ke negara tujuan utama. Hal ini masih menjadi kelemahan produk perikanan Indonesia, walaupun setiap tahun sudah besar perhatian dari pemerintah dan pelaku usaha, namun masih ditemukan sejumlah keluhan terhadap aspek ini.

Dalam melakukan ekspor produk perikanan, beberapa faktor yang menjadi kendala, yaitu: rendahnya tingkat penerapan teknologi, pembangunan infrastruktur yang tidak merata di berbagai sentra perikanan, keterbatasan tingkat pemberian modal, rendahnya pemanfaatan potensi kelautan Indonesia dan proses produksi yang masih menggunakan sistem tangkap dianggap tidak mampu memanfaatkan potensi kelautan Indonesia secara maksimal, ekspor produk udang Indonesia hanya dapat dilakukan oleh industri, dan permasalahan regulasi di negara tujuan. Contoh regulasi yang menjadi tantangan adalah *Food Sanitation Act* di Jepang, di mana importir harus melaporkan produk impornya kepada pihak karantina. Sejak tahun 2011, *seafood* menjadi salah satu produk yang harus menjalani *compulsory testing*, di mana produk impor tidak boleh mengandung komponen kimia melebihi batas standar residu komponen kimia yang ditetapkan oleh *Ministry of Health, Labour and Welfare* di Jepang.¹⁴

METODE PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan dalam studi ini yaitu metode analisis deskriptif. Metode ini adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap hambatan ekspor perikanan Indonesia. Sedangkan sumber data yang digunakan diperoleh dengan cara penelusuran literatur dan *review* terhadap studi terdahulu yang berkaitan dengan hambatan ekspor dan strategi untuk mengatasi hambatan tersebut, baik berupa hasil-hasil penelitian, peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya yang mendukung tujuan studi ini. Sumber data dari studi ini adalah data dari BPS, KKP, FAO, dan tulisan ilmiah yang bisa di peroleh secara *online*. Data yang telah terkumpul melalui serangkaian studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian dan menarik simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Ekspor Perikanan dan Hambatannya

Total volume ekspor hasil perikanan Indonesia periode Januari-Oktober 2015 turun sebesar 16,84 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Jika dilihat dari nilai, ekspor hasil perikanan Indonesia mengalami penurunan sebesar 14,59 persen, dari 3,83 miliar USD periode Januari-Oktober 2014 turun menjadi 3,27 miliar USD periode yang sama tahun 2015.

¹¹ Guillermo Valles and David Vivas Eugui, "Trade in Sustainable Fisheries and Aquaculture", *Trade and Environment Review 2016: Fish Trade, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*, 2016.

¹² L. Adrianto, Perikanan Inklusif. *Kompas*, 17 Oktober 2016.

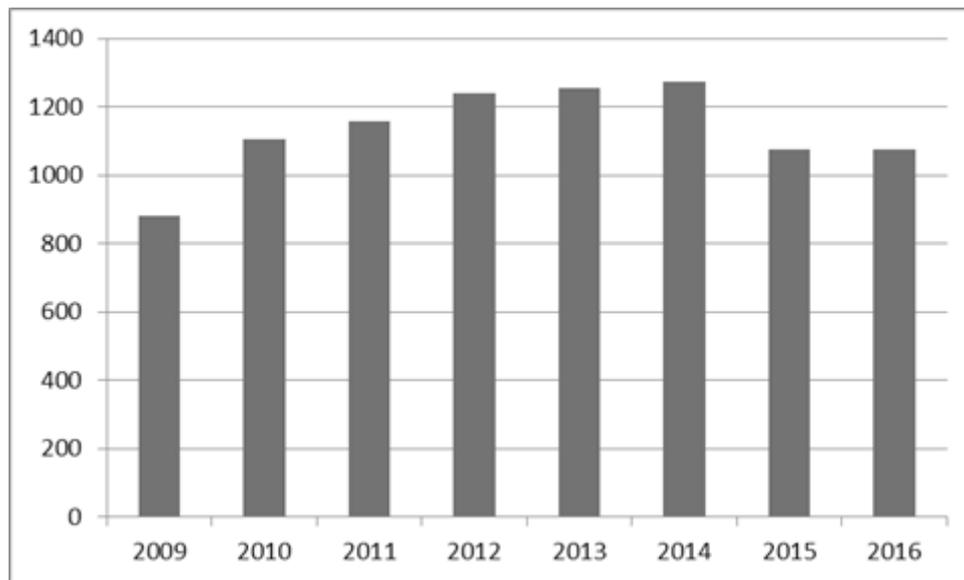
¹³ Tika Nur Pusparini, "The Impact of Food Safety Measures Implementation on Indonesia's Exports of Fisheries", *thesis*, International Institute of Social Studies, The Hague, Netherland, 2015.

¹⁴ Karunia Saputri, "Peluang dan Kendala Ekspor Udang Indonesia ke Pasar Jepang", *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 5(4), 2017, pp. 1179 -1194.

Apabila ditinjau dari kontribusi masing-masing komoditas terhadap nilai ekspor hasil perikanan, maka udang merupakan penyumbang terbesar nilai ekspor hasil perikanan periode Januari-Oktober 2015, yaitu 1,37 milyar USD (41,87 persen) dari total nilai ekspor hasil perikanan Indonesia. Peringkat kedua diduduki komoditas tuna, tongkol, dan cakalang, sebesar 492 juta USD (15,03 persen) dan kepiting sebesar 266 juta USD (8,12 persen). Mengenai volume ekspor hasil perikanan dapat dilihat pada Gambar 1.

pasar dan industri. Periode Januari-Oktober 2015, nilai impor dan ekspor hasil perikanan Indonesia masing-masing sebesar 331 juta USD dan 3,27 milyar USD. Hal ini menunjukkan bahwa perbandingan nilai impor dan nilai ekspor periode Januari-Oktober 2015 sebesar 10,12 persen, masih dibawah 20 persen. Mengenai volume impor hasil perikanan dapat dilihat pada Gambar 2.

Produk unggulan ekspor didominasi oleh produk perikanan segar dan belum memasukkan produk

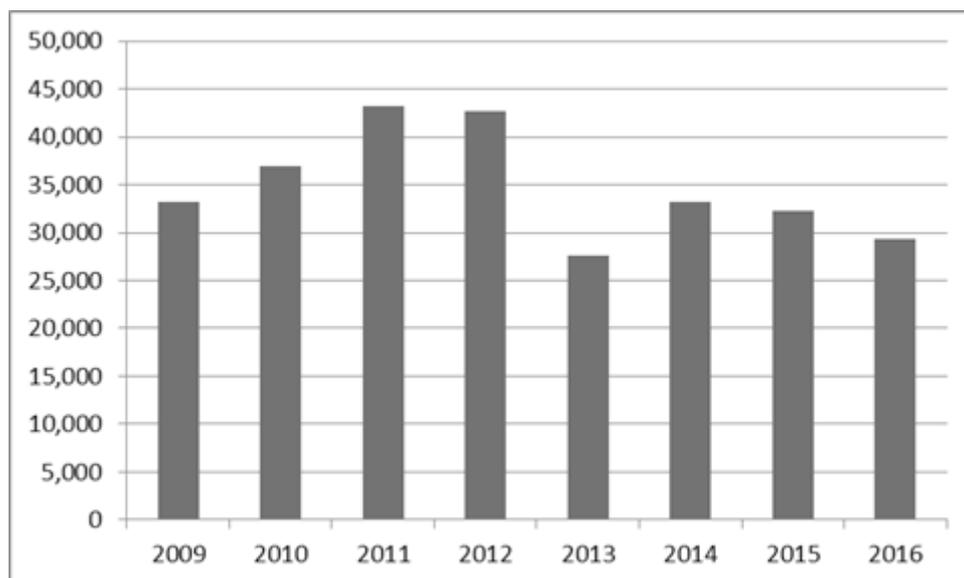


Sumber: BPS dan KKP (2015) dan BPS (beragam tahun)

Gambar 1. Volume Ekspor Hasil Perikanan, 2009 – 2016 (ton)

Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan perikanan telah menetapkan persentase nilai impor hasil perikanan harus lebih kecil 20 persen dari total nilai ekspor dengan memerhatikan standar mutu yang dikendalikan dalam rangka memenuhi kebutuhan

perikanan olahan. Produk perikanan olahan impor berasal dari China dan Jepang. Hambatan ekspor hasil perikanan Indonesia yang dapat diidentifikasi adalah:



Sumber: BPS dan KKP (2015) dan BPS (beragam tahun)

Gambar 2. Volume Impor Hasil Perikanan, 2009 – 2016 (ton)

1. Armada perikanan masih belum optimal
Perahu/kapal dengan menggunakan motor lebih mendominasi dibandingkan perahu/kapal tanpa motor. Secara nasional, terjadi penurunan jumlah perahu/kapal penangkap ikan pada tahun 2014 dibanding tahun 2013. Pada tahun 2013, jumlah perahu/kapal penangkap ikan sebesar 877.333 buah, turun menjadi 576.012 buah di tahun 2014 (34,35 persen). Penurunan paling besar terjadi pada jumlah perahu/kapal tanpa motor yaitu sebesar 63,92 persen, disusul kapal motor sebesar 11,06 persen, dan motor tempel sebesar 5,12 persen dibandingkan tahun 2013. Jumlah alat penangkap ikan yang digunakan mengalami kenaikan selama periode 2010-2013, dengan kenaikan rata-rata sebesar 5,54 persen per tahun. Namun pada tahun 2014 jumlah alat penangkap ikan laut sedikit mengalami penurunan sebesar 0,09 persen dibandingkan tahun 2013. Jenis alat penangkap ikan yang paling banyak digunakan di Indonesia pada tahun 2014 adalah pancing ulur, yaitu sejumlah 170.561 buah. Sementara alat yang paling sedikit digunakan adalah jenis pukat tarik berbingkai sejumlah 100 buah.
Data tersebut menunjukkan bahwa armada perikanan Indonesia masih belum modern, khususnya alat penangkap ikan. Armada perikanan yang modern akan membantu pelaksanaan kedaulatan dan pemanfaatan sumber daya ikan secara optimal. Nelayan akan mampu menangkap ikan sampai ke laut teritorial atau bahkan laut ZEE dan diharapkan dapat meningkatkan produksi ikan nasional. Pada periode pemerintahan 2009-2014, pemerintah telah banyak memberikan bantuan armada kapal dan alat tangkap ikan setiap tahun. Pada 2016, target penyaluran bantuan mencapai 1.719 kapal dengan realisasi 754 kapal atau hanya 44% yang terealisasi. Sedangkan pada 2017, proyeksi bantuan kapal mencapai 1.068 unit.¹⁵ Rendahnya realisasi pemberian bantuan armada perikanan di tahun 2016 karena pemerintah sangat berhati-hati dalam memberikan bantuan. Prinsip *good governance* dan semangat pemberian bantuan harus tepat sasaran menjadi kunci dari pelaksanaan program ini. Ditambah lagi pada tahun-tahun sebelumnya banyak oknum pemerintah di daerah yang menjadi tersangka karena program ini.
2. Masih rendahnya standar kualitas komoditas perikanan Indonesia
Sampai tahun 2015, sudah ada 38 negara yang memiliki *mutual recognition arrangement* (MRA) dengan Indonesia. Apabila terjadi penolakan ekspor, maka otoritas yang berwenang dalam tindak lanjut notifikasi adalah atase perdagangan di luar negeri dan Badan Karantina Ikan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan. Sebelum tahun 2015, jumlah kasus penolakan ekspor mencapai lebih dari 10 kasus, dengan kasus penolakan terbanyak ditemukan di China tahun 2009 (12 kasus), Italia tahun 2012 (9 kasus), dan Rusia tahun 2010 (7 kasus). Pada tahun 2015 jumlah kasus penolakan ekspor terbanyak adalah 2 kasus masing-masing di Kanada, Rusia, Perancis, dan Inggris.
Penyebab penolakan berbeda-beda di setiap negara, sebagai contoh US FDA menetapkan 4 kategori penyebab penolakan terhadap komoditas impor ke Amerika Serikat yaitu adanya bakteri pathogen maupun toksin yang dihasilkan, bahan kimia yang dilarang penggunaannya atau melebihi batas maksimum penggunaan, adanya bahan asing yang seharusnya tidak terdapat pada produk (*filthy*), serta kesalahan pengemasan (*misbranding*). Penolakan terbesar impor komoditi perikanan asal Indonesia masih disebabkan oleh bakteri pathogen (80%).¹⁶
Sedangkan Chen dalam penelitiannya yang dipublikasikan tahun 2014 menyebutkan bahwa Indonesia memiliki rantai pasokan *seafood* yang ragamnya berbeda-beda dan pengaturannya berkembang dinamis. Kekuatan pasar *seafood* dipegang oleh pedagang perantara karena nelayan/pembudi daya ikan dan pengolah sangat bergantung pada mereka untuk menghubungkan dengan permintaan terhadap ikan. Di tingkat hilir, implementasi terhadap sistem HACCP meningkat. Namun, operator skala kecil, khususnya mereka yang berada di tingkat hulu, tidak akrab dengan syarat dalam HACCP seperti praktik kebersihan dasar dan sistem pelacakan (*trace*).
Selain aspek kuantitas yang ditunjukkan oleh armada penangkapan ikan yang belum memadai, aspek kualitas juga menjadi penting. Hal ini bisa ditinjau dari masih adanya penolakan terhadap produk perikanan Indonesia yang dipasarkan.

¹⁵ KKP, Laut Masa Depan Bangsa: Kedaulatan, Keberlanjutan, Kesejahteraan, Jakarta: KKP RI, 2018.

¹⁶ Rinto, "Kajian Penolakan Ekspor Produk Perikanan Indonesia ke Amerika Serikat", *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan III*, Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, 2011.

Dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, kasus penolakan ekspor produk perikanan Indonesia sudah jauh menurun. Pemerintah dan pemerintah daerah sering melakukan kerja sama dengan negara tujuan ekspor dan membimbing langsung eksportir perikanan. Rata-rata eksportir perikanan Indonesia, seperti yang dijumpai oleh penulis saat melakukan penelitian tahun 2016 di Kabupaten Kepulauan Anambas; Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah; Kabupaten Sumbawa; merupakan pelaku usaha menengah dan besar. Alangkah baiknya, pemerintah daerah memfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil untuk membentuk koperasi dengan tujuan memasarkan produknya ke luar daerah. Bantuan teknis dan peralatan dapat diberikan melalui koperasi tersebut dan kegiatan pengolahan atau pasca panen bisa dilakukan dengan mengikutsertakan anggota rumah tangga lain, sehingga bisa meningkatkan penghasilan rumah tangga.

Strategi Peningkatan Ekspor Perikanan

Adanya hambatan ekspor perikanan dapat mengganggu upaya pemerintah meningkatkan ekspor produk perikanan Indonesia sehingga perlunya dirumuskan strategi yang perlu dilakukan. Strategi ini memperkuat atau memperbaiki strategi yang sudah dilakukan pemerintah. Strategi tersebut meliputi:

1. Pemberian Izin

Produksi perikanan Indonesia sampai triwulan III tahun 2015 mencapai 14,79 juta ton, dengan kontribusi dari perikanan tangkap mencapai 4,72 juta ton dan sisanya berasal dari perikanan budidaya sebesar 10,07 juta ton. Produksi perikanan tangkap tersebut berasal dari 4.036 alat penangkap ikan, seperti dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Keragaan Kapal Perikanan Izin Pusat, 2012 – 2014

Alat Penangkap Ikan	Tahun		
	2012	2013	2014
Pukat cincin pelagis kecil	1253	1327	1166
Rawai tuna	802	737	552
Pukat ikan	720	699	341
Bouke ami	429	502	553
Pengangkut/pengumpul	427	450	428
Lain-lain	679	790	996
Total	4310	4505	4036

Sumber: BPS dan KKP (2015)

Mayoritas kapal perikanan yang berasal dari izin pusat terbanyak berada di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 711, 573, 718, 713, dan 712, seperti

dapat dilihat pada Tabel 2. Wilayah pengelolaan perikanan dibagi menjadi: WPP 571 (Selat Malaka), WPP 572 (Samudera Indonesia-Pantai Barat Sumatera), WPP 573 (Samudera Indonesia-Selatan Jawa), WPP 711 (Laut China Selatan), WPP 712 (Laut Jawa), WPP 713 (Selat Makassar dan Laut Flores), WPP 714 (Laut Banda), WPP 715 (Teluk Tomini dan Laut Seram), WPP 716 (Laut Sulawesi), WPP 717 (Samudera Pasifik), dan WPP 718 (Laut Arafura dan Laut Timor). Potensi sumber daya ikan yang tinggi dimiliki oleh WPP 711, WPP 713, WPP 718, dan WPP 712. WPP yang sudah berada dalam status tangkap lebih adalah WPP 571, WPP 714, dan WPP 717.

Tabel 2. Keragaan Mayoritas Kapal Perikanan Izin Pusat Menurut Wilayah Pengelolaan Perikanan

WPP RI No.	Tahun		
	2012	2013	2014
573	1091	956	820
711	1191	2673	1292
718	1033	1251	875
713	593	573	439
712	352	370	393

Sumber: BPS dan KKP (2015)

Dilihat dari Tabel 2 di atas, maka sudah seharusnya pemerintah menggunakan perhitungan potensi sumber daya ikan dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagai rujukan pemberian izin. Demikian juga dengan pemerintah daerah, mengingat pemerintah daerah juga memiliki kewenangan pemberian izin berdasarkan jangkauan kapal perikanan. Perhitungan potensi sumber daya ikan dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan merupakan kewenangan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, sebuah lembaga dibawah KKP. Perhitungan potensi ini harus dimutakhirkan agar pemberian izin juga bisa dilakukan dengan benar. Hal ini sejalan dengan pendapat Adrianto bahwa perlu memerhatikan faktor eko-biologi dalam pengambilan keputusan terkait dengan perikanan.¹⁷

2. Mengembangkan Sistem Logistik Ikan Nasional

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memiliki Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN), suatu sistem yang pada intinya merupakan suatu jaringan pemasokan bahan baku terpadu dikembangkan secara nasional. SLIN merupakan sistem yang diantaranya mengumpulkan ikan dari daerah-daerah produsen dan dikirim ke daerah konsumen (industri). Fungsi dari SLIN lainnya yaitu menyimpan dan mendistribusikan ikan ke daerah konsumen dan

¹⁷ L. Adrianto, *Op. Cit*

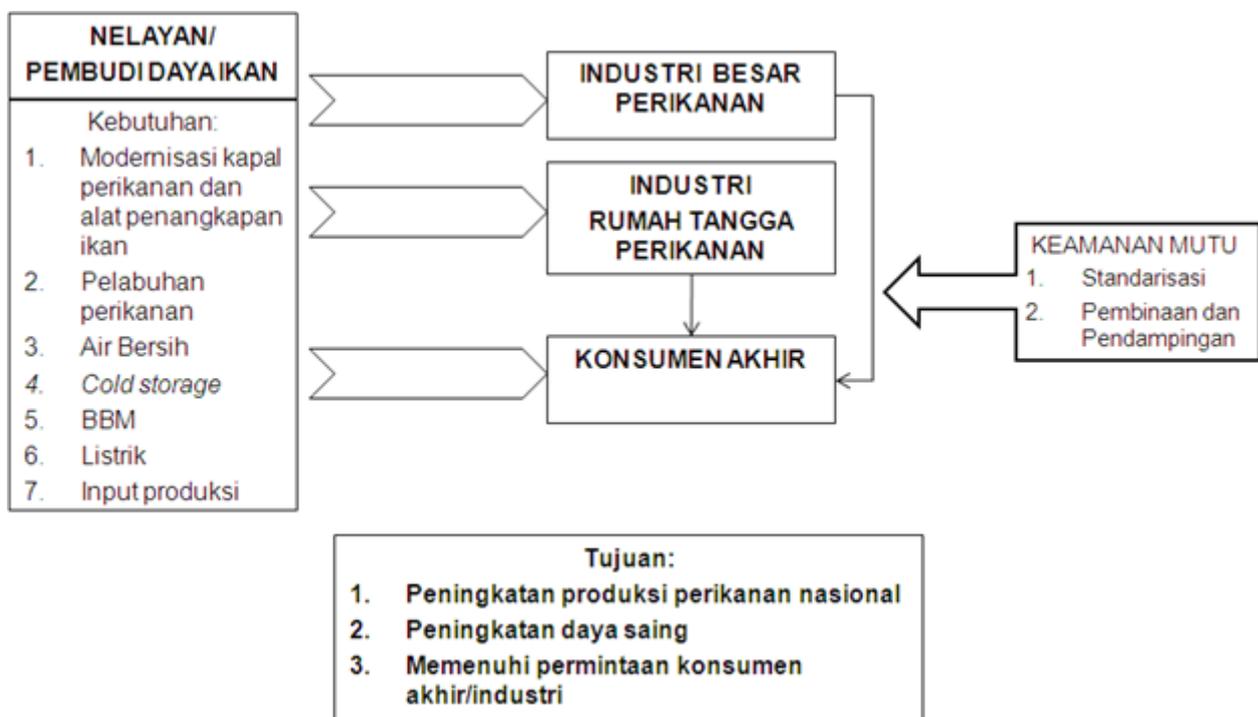
industri.¹⁸ SLIN telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 5 Tahun 2014.

Sistem logistik ikan tidak mudah dijalankan, karena ikan bersifat *perishable* sehingga penanganan logistiknya lebih kompleks dan mahal, terutama dalam hal penyimpanan. Perlu dirumuskan bagaimana model kelembagaannya, infrastruktur distribusi dan transportasi harus dikembangkan untuk menjamin konektivitas.¹⁹ Sistem logistik perikanan bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia, khususnya produk perikanan olahan dan perikanan segar sebagai bahan baku perikanan olahan. Sistem ini dilakukan guna mendukung kebijakan industrialisasi perikanan.

Kebijakan industrialisasi perikanan pada dasarnya ditujukan untuk mendorong produksi perikanan Indonesia, melalui pendekatan kluster yang berdasarkan pada komoditas perikanan

besar. Oleh karena itu, kebijakan sistem logistik perikanan harus mengakomodasi kegiatan industri rumah tangga yang bergerak pada pengolahan hasil perikanan. Secara umum, sistem logistik perikanan nasional merupakan upaya agar produk perikanan dapat cepat sampai ke konsumen, dengan tetap menjaga kualitas produk perikanan yang dihasilkan. Sistem ini harus mampu menjawab permasalahan nelayan dan industri perikanan.

Kebijakan sistem logistik perikanan tidak bisa dipisahkan dari upaya menjaga standar keamanan mutu hasil perikanan, agar hasil perikanan yang dihasilkan tetap segar, tidak tercemar residu hasil cemaran, dan bebas wabah penyakit ikan. Oleh karena itu, kualitas dan jumlah penyuluh perikanan harus memadai yang disesuaikan dengan sentra lokasi perikanan yang ditetapkan. Secara makro, sistem logistik perikanan dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Sistem Logistik Perikanan Nasional

utama. Sistem logistik perikanan harus dapat menjawab permasalahan masif yang terjadi pada sektor perikanan dengan melakukan sejumlah solusi, utamanya terkait dengan eksploitasi yang berwawasan lingkungan terhadap sumber daya ikan, modernisasi kapal perikanan dan alat tangkap ikan, menyelesaikan permasalahan pemasaran, penyediaan *cold storage*, dan subsidi bahan bakar minyak.

Pemerintah harus menghindari sistem logistik perikanan dilakukan hanya untuk kegiatan industri

3. Mensosialisasikan Mutu Produk

Ketentuan standar mutu produk hasil perikanan berbeda-beda pada setiap negara tujuan. Dalam konteks ekspor udang windu menyebutkan bahwa perlu dilakukan sosialisasi dengan berbagai cara, antara lain²⁰ loka karya, pelatihan, penyuluhan, dan pertemuan antar instansi pemerintah yang terkait dan swasta, termasuk pembudidaya udang. Sosialisasi pencegahan residu antibiotik mempunyai

¹⁸ V. P. H. Nikjuluw, "Logistik Ikan Nasional" *Warta Pasar Ikan*, Volume 94, Edisi Juni 2011.

¹⁹ A. Satria, "Sistem Logistik Ikan", *Kompas*, 16 Oktober 2012.

²⁰ Irwandaru Dananjaya dan Ajie Wahyujati, "Peningkatan Daya Saing Produk Lokal dalam Upaya Standarisasi Memasuki Pasar Global (Standarisasi Mutu dan Kualitas Produk Udang Windu)", *UG Jurnal*, Vol. 6 No. 02, 2012, hlm. 09 – 15.

tujuan utama untuk menyadarkan pembudi daya atau pengolah udang untuk tidak menggunakan antibiotik terlarang selama proses budi daya, khususnya pada tahap pembesaran atau saat penanganan dan pengolahan udang.

Hal yang sama juga berlaku pada ekspor komoditas perikanan tangkap, di mana sejak satu dasawarsa terakhir ada keinginan untuk dapat melacak asal komoditas perikanan yang kita makan, termasuk tata cara penangkapannya, apakah ditangkap oleh pihak yang memiliki hak menangkap ikan yang sah atau tidak. Konsep berbasis keberlanjutan terhadap pemanfaatan jasa sumber daya perikanan yang lebih luas telah semakin ditingkatkan.²¹

Dalam konteks tersebut, peran dari pemerintah dan pemerintah daerah perlu dioptimalkan. Pembinaan dan pengawasan merupakan aspek penting dalam peningkatan ekspor produk perikanan.

4. Mengembangkan Pengelolaan Perikanan Berbasis WPP

Ada empat provinsi yang memiliki hasil dan intensitas ekspor perikanan yang tinggi di Indonesia pada tahun 2013, yaitu: Propinsi Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Lampung dan Sumatera Utara. Ada 5 provinsi yang menghasilkan output tinggi, namun intensitas ekspor rendah, yaitu Provinsi Sumatera

Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Riau; serta dua provinsi yang menghasilkan intensitas ekspor tinggi namun outputnya rendah, yaitu: Provinsi Sulawesi Utara dan Bali. Mereka memberikan rekomendasi bahwa terhadap provinsi yang menghasilkan output tinggi dan intensitas ekspor perikanan yang tinggi tersebut dapat digunakan sebagai percontohan daerah pengembangan dan intensitas ekspor perikanan di provinsi lain.²²

Pengembangan ekspor perikanan Indonesia seharusnya tidak didasarkan pada daerah administratif, mengingat komoditas ini sangat dinamis. Lebih baik pengembangannya berdasarkan WPP RI. Pengembangan yang didasarkan pada administratif hanya akan menimbulkan konflik dan tidak menggambarkan potensi sumber daya ikan sesungguhnya. Potensi sumber daya ikan memang lebih tepat untuk kegiatan yang mendorong pengembangan perikanan tangkap, sedangkan perikanan budi daya lebih dinamis.

Pengembangan ekspor perikanan merupakan kegiatan yang ada pada aspek pasca panen, sehingga pengembangannya bisa didasarkan pada wilayah administrasi dengan mengutamakan kegiatan perikanan tangkap sebagai fokus utama. Potensi sumber daya ikan berdasarkan wilayah pengelolaan dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Potensi Sumber Daya Ikan Tahun 2016 (KKP, 2018)

²¹ R. Hilborn, E. A. Fulton, B. S. Green, K. Hartmann, S. R. Tracey, and R. A. Watson, "When is a fishery sustainable?", *Canada Journal Fisheries Aquatic Science*, (72), 2015, pp. 1433 – 1441.

²² Lucky Rachmawati, Djoko Mursinto, and Nurul Istifadah, "Fishery's Potential in Indonesia", *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, Volume 6 Issue 2, 2017, pp.58-64.

5. Mengedepankan prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan

Kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan sudah harus memerhatikan prinsip pengelolaan perikanan secara berkelanjutan. Hal ini terkait dengan mulai digerakkannya kesadaran dan kepedulian internasional bahwa pemanfaatan sumber daya ikan harus memerhatikan keberadaan generasi mendatang karena pemanfaatan sumber daya ikan sangat terkait dengan aspek kelestarian lingkungan. Pemanfaatan sumber daya ikan yang menggunakan bahan peledak dan penggunaan pakan berbahaya bagi kesehatan manusia sudah tidak bisa lagi dibenarkan. Pemanfaatan sumber daya ikan juga sudah mulai dipikirkan dengan cara beradab dan berkeadilan. Tidak dilakukan dengan cara bertentangan hukum internasional sehingga aspek pelacakan (*traceability*) telah menjadi pandangan dari importir atau negara tujuan ekspor. Di masa depan hal ini akan dilakukan secara terus-menerus dan menjadi kesadaran bersama.

Pelacakan didefinisikan oleh *Codex Alimentarius* sebagai “kemampuan mengikuti pergerakan makanan melalui tahap produksi, pengolahan, dan distribusi”. Selain berperan dalam menyediakan informasi terkait dengan persyaratan keamanan pangan, penelusuran atau pelacakan produk perikanan juga penting bagi pengembangan alat yang efektif untuk memberantas *IUU fishing*. Peraturan di Uni Eropa No 1005 tahun 2008 telah mengatur hal tersebut. Berdasarkan peraturan tersebut, setiap perdagangan *seafood* di Uni Eropa harus dilakukan oleh kapal penangkapan ikan yang memiliki sertifikat penangkapan yang dikeluarkan oleh otoritas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan perikanan. Termasuk Jepang juga ikut menandatangani kesepakatan bekerja sama dengan Uni Eropa memerangi *IUU fishing* melalui larangan impor *seafood* yang ditangkap secara tidak sah²³

Atas dasar itu, kaidah hukum internasional yang sudah banyak diadopsi dalam hukum nasional harus ditaati bersama. Prinsip pengelolaan perikanan secara berkelanjutan, bukan saja pemanfaatannya tidak boleh merusak lingkungan, tetapi juga bermanfaat secara sosial pada masyarakat sekitar. Keberadaan usaha perikanan harus dapat diterima oleh masyarakat dan tidak menimbulkan dampak eksternalitas, tetapi menimbulkan manfaat. Pemanfaatan sumber daya ikan oleh pelaku usaha juga tidak boleh mengeksploitasi pekerja di luar

batas jam yang diperbolehkan dan mempekerjakan anak, sebagaimana diatur dalam hukum nasional kita, yaitu Permen Kelautan dan Perikanan No. 35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan. Sehingga di masa depan pemanfaatan sumber daya perikanan tidak hanya mampu mensejahterakan para pihak, tetapi juga menjadi lebih beradab dan berkeadilan.

PENUTUP

Pemerintah telah menetapkan persentase nilai impor hasil perikanan harus lebih kecil 20 persen dari total nilai ekspor dengan memerhatikan standar mutu yang dikendalikan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar dan industri. Hambatan ekspor hasil perikanan Indonesia yang dapat diidentifikasi adalah: armada perikanan masih belum optimal, dan masih adanya kegiatan pengolahan hasil perikanan yang belum memenuhi standar. Untuk mengatasi hambatan tersebut, perlu diterapkan strategi peningkatan ekspor perikanan, yaitu: perbaikan mekanisme pemberian izin, mengembangkan SLIN, mensosialisasikan kualitas produk perikanan Indonesia, dan mengembangkan pengelolaan perikanan berbasis WPP, bukan wilayah administratif, serta mengedepankan prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan. Strategi seperti mengembangkan SLIN dan mensosialisasikan kualitas produk perikanan Indonesia telah dilakukan. Namun masih ditemukan adanya kelemahan, seperti kurangnya keterlibatan UMKM dan perlunya peningkatan peran pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel dalam Buku Kumpulan

- Basri, Faisal dan Munandar, Haris. (2010). *Dasar-dasar Ekonomi Internasional*, Jakarta: Penerbit Prenada Media Group.
- FAO. (2016). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2016*. Rome: Food and Agriculture Organization of The United Nations.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2018). *Laut Masa Depan Bangsa: Kedaulatan, Keberlanjutan, Kesejahteraan*, Jakarta: KKP RI.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2011). *Statistik Kelautan dan Perikanan 2011*, Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.

²³ Lahsen Ababouch, Stefania Vannuccini, and Victorio Chomo, (2016), Fisheries, Aquaculture Utilization and Trade: Challenges and Opportunities, in *Trade and Environment Review 2016: Fish Trade, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*.

Lynn, Stuart R. (2002). *Economic Development, USA*: Pearson Education Inc.

Jurnal

Dananjaya, Irwandar dan Ajie Wahyujati. (2012). Peningkatan Daya Saing Produk Lokal dalam Upaya Standardisasi Memasuki Pasar Global (Standardisasi Mutu dan Kualitas Produk Udang Windu), *UG Jurnal*, Vol. 6 No. 02, hlm. 09 – 15.

Hilborn, R., Fulton, E. A., Green, B. S., Hartmann, K., Tracey, S. R., and Watson, R. A. (2015). When is a fishery sustainable?, *Canada Journal Fisheries Aquatic Science*, (72), pp. 1433 – 1441.

Huda, S. (2006). Analisis Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor Non-Migas Indonesia, *Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 6 (2), September, pp. 117-124.

Rachmawati, Lucky, Djoko Mursinto, and Nurul Istifadah. (2017). Fishery's Potential in Indonesia, *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, Volume 6 Issue 2, pp.58-64.

Saputri, K. (2017) Peluang dan Kendala Ekspor Udang Indonesia ke Pasar Jepang, *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 5(4), pp. 1179 -1194.

Tulisan Koran

Adrianto, L. (2016). Perikanan Inklusif. *Kompas*, 17 Oktober 2016.

Satria, A. (2012). Sistem Logistik Ikan, *Kompas*, 16 Oktober 2012.

Working Paper

Ababouch, Lahsen, Stefania Vannuccini, and Victorio Chomo. (2016). Fisheries, Aquaculture Utilization and Trade: Challenges and Opportunities, *Trade and Environment Review 2016: Fish Trade*, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).

Mallawa, A. (2006). Pengelolaan Sumberdaya Ikan Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat. Lokakarya Agenda Penelitian Program COREMAP II, Kabupaten Selayar, 9 – 10 September 2006.

Nikijuluw, V. P. H. (2011). Logistik Ikan Nasional. *Warta Pasar Ikan*. Volume 94. Edisi Juni.

Rinto. (2011). Kajian Penolakan Ekspor Produk Perikanan Indonesia ke Amerika Serikat. *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan III*. Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan.

Valles, Guillermo and David Vivas Eugui. (2016). Trade in Sustainable Fisheries and Aquaculture, in *Trade and Environment Review 2016: Fish Trade*, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).

Thesis

Chen, A. (2014) The Impact of SPS Measures on Agricultural Exports From Developing Countries: A Case Study of Indonesian Fishery Industry, *thesis*, World Trade Institute, Swiss.

Pusparini, T.N. (2015). The Impact of Food Safety Measures Implementation on Indonesia's Exports of Fisheries, *thesis*, International Institute of Social Studies, The Hague, Netherland.

Internet

Indonesian Chamber of Commerce. (2011). Ekspor dan Daya Saing, (*online*), (<http://image.kadin-indonesia.or.id/images/file/kadinindonesia20120608101837.pdf>), diakses 6 September 2017

Presiden: Perhatikan Ekspor Perikanan, (*online*), (<http://www.ksp.go.id/presiden-perhatikan-ekspor-perikanan/index.html>), diakses 18 Februari 2018).